



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	7 (<i>tujuh</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi / Kepala BKPM
Hari, Tanggal	:	Senin, 31 Mei 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Perkenalan; 2. Membahas Program Kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM 3. Realisasi investasi sampai dengan bulan Mei 2021.
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada pukul 14.17 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 31 Mei 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait realisasi investasi hingga Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp 219,7 Triliun atau sebesar 24,4% dari target realisasi investasi Tahun 2021.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperhatikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal serta alih teknologi.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Instansi lain untuk menyusun *roadmap* investasi prioritas sejalan dengan rencana pembangunan nasional.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap investor yang sudah masuk ke Indonesia.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan:

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memastikan NSPK berjalan dengan baik, guna memberikan kepastian kepada investor.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103